



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, perlu diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Politik Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
25. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 693).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
14. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) Periode Anggaran.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26. Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.
27. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
28. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
29. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
31. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
33. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.873.366.560.771,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp166.170.492.261,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.316.532.994,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.076.038.000,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.007.545.275,00 (lima miliar tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.770.375.992,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.676.863.560.413,00 (satu trilyun enam ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.596.823.051.475,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.040.508.938,00 (delapan puluh miliar empat puluh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.332.508.097,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.954.981.043.614,00 (satu trilyun sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari;
 - b. Belanja Operasional;
 - c. Belanja Modal;
 - d. Belanja Tidak Terduga dan;
 - e. Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp1.256.949.706.642,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.457.337.773,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.513.022.000,00 (dua miliar rupiah lima ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu rupiah);
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp551.060.977.199,00 (lima ratus lima puluh satu miliar enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Pasal 8

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp81.614.482.843,00 (delapan puluh satu miliar enam seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Perubahan APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 10

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Bireuen
 Nomor :
 Tanggal :

KABUPATEN BIREUEN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.695.182.233	166.170.492.261	3.475.310.028	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	34.316.532.994	34.316.532.994	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.150.000.000	3.150.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000	900.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.178.532.994	20.178.532.994	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.178.532.994	20.178.532.994	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.178.532.994	20.178.532.994	0	0 %

4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.638.000.000	2.638.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.638.000.000	2.638.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.638.000.000	2.638.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.180.738.000	17.076.038.000	3.895.300.000	30 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.856.738.000	13.752.038.000	3.895.300.000	40 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.464.000.000	9.359.300.000	3.895.300.000	71 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.464.000.000	9.359.300.000	3.895.300.000	71 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.582.738.000	1.582.738.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	565.000.000	565.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.017.738.000	1.017.738.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000	80.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000	80.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	500.000.000	0	0 %

4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.574.000.000	2.574.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	939.000.000	939.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	811.000.000	811.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	28.000.000	28.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	220.000.000	220.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	220.000.000	220.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.415.771.469	5.007.545.275	(408.226.194)	8 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.415.771.469	5.007.545.275	(408.226.194)	8 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.415.771.469	5.007.545.275	(408.226.194)	8 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.415.771.469	5.007.545.275	(408.226.194)	8 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.782.139.770	109.770.375.992	(11.763.778)	0 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	155.560.000	155.560.000	0	0 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	155.560.000	155.560.000	0	0 %
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	155.560.000	155.560.000	0	0 %

4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	505.600.000	505.600.000	0	0 %
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	505.600.000	505.600.000	0	0 %
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	505.600.000	505.600.000	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000	2.200.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000	2.200.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000	2.200.000.000	0	0 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.455.000.000	1.056.750	(1.453.943.250)	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.455.000.000	1.056.750	(1.453.943.250)	100 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.455.000.000	1.056.750	(1.453.943.250)	100 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000	1.942.179.472	1.442.179.472	288 %
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0	0	0	0 %
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0	0	0	0 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	292.332.262	292.332.262	100 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	292.332.262	292.332.262	100 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	153.330.900	153.330.900	100 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0	153.330.900	153.330.900	100 %
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	142.005.966	142.005.966	100 %
4.1.04.15.34.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	142.005.966	142.005.966	100 %
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0	366.149.371	366.149.371	100 %

4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0	104.967.279	104.967.279	100 %
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0	39.439.582	39.439.582	100 %
4.1.04.15.61.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	221.742.510	221.742.510	100 %
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0	893.835.832	893.835.832	100 %
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0	893.835.832	893.835.832	100 %
4.1.04.15.68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0	94.525.141	94.525.141	100 %
4.1.04.15.68.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	0	94.525.141	94.525.141	100 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	94.434.481.895	94.434.481.895	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	94.434.481.895	94.434.481.895	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	94.434.481.895	94.434.481.895	0	0 %
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	10.031.497.875	10.031.497.875	0	0 %
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	10.031.497.875	10.031.497.875	0	0 %
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	4.231.497.875	4.231.497.875	0	0 %
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	5.800.000.000	5.800.000.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.665.061.426.687	1.676.863.560.413	11.802.133.726	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.586.121.857.000	1.596.823.051.475	10.701.194.475	1 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.128.529.237.000	1.123.706.963.475	(4.822.273.525)	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.327.859.000	12.621.749.000	293.890.000	2 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.137.245.000	2.137.245.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.889.761.000	4.889.761.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	293.890.000	293.890.000	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	722.157.000	722.157.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.157.000	9.157.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.805.107.000	2.805.107.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	29.100.000	29.100.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.735.332.000	1.735.332.000	0	0 %

4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	829.294.942.000	829.294.942.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	829.294.942.000	829.294.942.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.828.945.000	76.828.945.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	588.745.000	588.745.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.982.203.000	4.982.203.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.480.501.000	2.480.501.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.166.792.000	2.166.792.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.400.000.000	6.400.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.424.853.000	25.424.853.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.177.342.000	6.177.342.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.902.322.000	4.902.322.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	715.276.000	715.276.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	5.601.876.000	5.601.876.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.253.723.000	1.253.723.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.735.312.000	13.735.312.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	210.077.491.000	204.961.327.475	(5.116.163.525)	2 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	55.107.320.000	55.106.349.270	(970.730)	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.785.000.000	1.785.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	84.755.660.000	84.755.660.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.954.001.000	2.954.001.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.763.242.000	11.763.242.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.922.600.000	8.005.680.000	83.080.000	1 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	5.283.000.000	5.283.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.047.236.000	24.958.872.835	(3.088.363.165)	11 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	433.364.000	433.364.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.003.442.000	8.020.311.783	(1.983.130.217)	20 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000	427.799.850	(150)	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	317.194.388	(121.605.612)	28 %

4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	721.075.000	715.901.349	(5.173.651)	1 %
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	434.951.000	434.951.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.424.037.000	11.424.037.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	11.424.037.000	11.424.037.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	11.424.037.000	11.424.037.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	446.168.583.000	461.692.051.000	15.523.468.000	3 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	446.168.583.000	461.692.051.000	15.523.468.000	3 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	446.168.583.000	461.692.051.000	15.523.468.000	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.939.569.687	80.040.508.938	1.100.939.251	1 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.051.000.000	40.714.863.705	2.663.863.705	7 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.051.000.000	40.714.863.705	2.663.863.705	7 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.575.988.000	9.036.045.521	(539.942.479)	6 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.553.226.000	5.158.183.296	(1.395.042.704)	21 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.311.501.000	14.167.173.893	855.672.893	6 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	49.153.000	45.123.627	(4.029.373)	8 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.561.132.000	12.308.337.368	3.747.205.368	44 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	40.888.569.687	39.325.645.233	(1.562.924.454)	4 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	40.888.569.687	39.325.645.233	(1.562.924.454)	4 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	40.888.569.687	39.325.645.233	(1.562.924.454)	4 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.224.642.000	30.332.508.097	3.107.866.097	11 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	314.642.000	314.642.000	0	0 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	314.642.000	314.642.000	0	0 %
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	314.642.000	314.642.000	0	0 %
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	314.642.000	314.642.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.910.000.000	30.017.866.097	3.107.866.097	12 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.910.000.000	30.017.866.097	3.107.866.097	12 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.910.000.000	30.017.866.097	3.107.866.097	12 %
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.910.000.000	30.017.866.097	3.107.866.097	12 %
	Jumlah Pendapatan	1.854.981.250.920	1.873.366.560.771	18.385.309.851	1 %
5	BELANJA				

5.1	BELANJA OPERASI	1.195.187.125.392	1.257.214.314.452	62.027.189.060	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	742.927.821.762	730.176.391.080	(12.751.430.682)	2 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	565.175.691.562	559.129.378.517	(6.046.313.045)	1 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	409.668.964.467	409.598.068.774	(70.895.693)	0 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	372.000.697.297	372.970.064.804	969.367.507	0 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	37.668.267.170	36.628.003.970	(1.040.263.200)	3 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.896.322.297	40.214.855.153	(2.681.467.144)	6 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.856.427.670	37.579.218.766	(1.277.208.904)	3 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.039.894.627	2.635.636.387	(1.404.258.240)	35 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.006.166.000	7.967.316.000	(38.850.000)	0 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.006.166.000	7.967.316.000	(38.850.000)	0 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.374.680.000	30.402.440.000	27.760.000	0 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.094.120.000	29.940.440.000	(153.680.000)	1 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	280.560.000	462.000.000	181.440.000	65 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.974.381.200	9.813.596.150	(160.785.050)	2 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.863.531.200	7.582.066.150	(281.465.050)	4 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.110.850.000	2.231.530.000	120.680.000	6 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.218.707.432	24.199.324.932	(19.382.500)	0 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.130.114.632	21.913.978.932	(216.135.700)	1 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.088.592.800	2.285.346.000	196.753.200	9 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.843.168.427	1.261.727.151	(581.441.276)	32 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.591.062.864	943.151.498	(647.911.366)	41 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	252.105.563	318.575.653	66.470.090	26 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.465.805.086	275.473.160	(1.190.331.926)	81 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.464.903.726	185.689.608	(1.279.214.118)	87 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	901.360	89.783.552	88.882.192	9.861 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.541.150.886	28.301.140.511	1.759.989.625	7 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.637.875.873	26.230.255.158	1.592.379.285	6 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.903.275.013	2.070.885.353	167.610.340	9 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.550.429.029	1.092.212.960	(458.216.069)	30 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.461.816.709	980.230.770	(481.585.939)	33 %

5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	88.612.320	111.982.190	23.369.870	26 %
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.527.951.006	2.962.937.266	(565.013.740)	16 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.263.126.006	2.638.002.726	(625.123.280)	19 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	264.825.000	324.934.540	60.109.540	23 %
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.107.965.732	3.040.286.460	(2.067.679.272)	40 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.994.600.554	1.582.377.122	(2.412.223.432)	60 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.113.365.178	1.457.909.338	344.544.160	31 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.066.000.966	39.527.090.705	(538.910.261)	1 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.147.426.905	5.144.708.899	3.997.281.994	348 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.147.426.905	5.144.708.899	3.997.281.994	348 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	18.844.591	18.844.591	100 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0	18.844.591	18.844.591	100 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	56.533.774	56.533.774	100 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0	56.533.774	56.533.774	100 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	38.918.574.061	34.307.003.441	(4.611.570.620)	12 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	38.918.574.061	34.307.003.441	(4.611.570.620)	12 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.365.536.200	111.847.048.674	3.481.512.474	3 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.452.744.000	1.452.744.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	129.250.000	129.250.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	32.900.000	32.900.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	901.969.000	901.969.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.100.000	4.100.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	153.750.000	153.750.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	106.600.000	106.600.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	89.175.000	89.175.000	0	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	374.742.000	374.742.000	0	0 %

5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	56.500.000	56.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	19.000.000	19.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	8.500.000	8.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	22.592.000	22.592.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	62.950.000	62.950.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	49.200.000	49.200.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	84.755.660.000	85.548.838.274	793.178.274	1 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	84.755.660.000	85.548.838.274	793.178.274	1 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.763.242.000	14.069.081.400	2.305.839.400	20 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	11.763.242.000	14.069.081.400	2.305.839.400	20 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.954.001.000	3.088.251.000	134.250.000	5 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.954.001.000	3.088.251.000	134.250.000	5 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.065.147.200	7.313.392.000	248.244.800	4 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.971.217.200	7.218.562.000	247.344.800	4 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	79.730.000	80.630.000	900.000	1 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	14.200.000	14.200.000	0	0 %

5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.202.663.384	18.220.663.384	18.000.000	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600	124.920.600	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600	124.920.600	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400	139.046.400	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400	139.046.400	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000	76.482.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000	76.482.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.562.600	116.562.600	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.562.600	116.562.600	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.606.300	12.606.300	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.606.300	12.606.300	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000	5.040.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000	5.040.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000	1.260.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000	1.260.000.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	377.934.973	395.934.973	18.000.000	5 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	377.934.973	395.934.973	18.000.000	5 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.985.000.011	3.985.000.011	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	84.000.000	84.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.500.011	6.500.011	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.500.000	6.500.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.888.000.000	3.888.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.884.000.000	4.884.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.884.000.000	4.884.000.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	355.899.800	355.899.800	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.070.000	7.070.000	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.070.000	7.070.000	0	0 %

5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000	52.920.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000	52.920.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160	7.097.160	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160	7.097.160	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.197	5.197	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.197	5.197	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.832.686	3.832.686	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.832.686	3.832.686	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	619.757	619.757	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	619.757	619.757	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	264.825.000	264.825.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.400.000	5.400.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	28.350.000	28.350.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.200.000	7.200.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	146.250.000	146.250.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	900.000	900.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.750.000	33.750.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.400.000	23.400.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.575.000	19.575.000	0	0 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	18.030.000	18.030.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.230.000	7.230.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	10.800.000	10.800.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	561.600.000	561.600.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	201.600.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	201.600.000	0	0 %

5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000	360.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	360.000.000	360.000.000	0	0 %
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	9.457.189.850	0	(9.457.189.850)	100 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	9.457.189.850	0	(9.457.189.850)	100 %
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	9.457.189.850	0	(9.457.189.850)	100 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	743.240.000	534.710.000	(208.530.000)	28 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	743.240.000	534.710.000	(208.530.000)	28 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	743.240.000	534.710.000	(208.530.000)	28 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.961.705.708	388.386.021.462	55.424.315.754	17 %
5.1.02.01	Belanja Barang	49.995.579.768	56.334.199.624	6.338.619.856	13 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.995.579.768	56.334.199.624	6.338.619.856	13 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.166.332	22.416.332	3.250.000	17 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	48.700.600	48.700.600	0	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.539.269.489	4.067.542.138	528.272.649	15 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	47.370.000	44.470.000	(2.900.000)	6 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.400.000	28.400.000	15.000.000	112 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	37.980.000	40.626.000	2.646.000	7 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.545.205.188	15.448.053.467	2.902.848.279	23 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	730.360.230	873.560.942	143.200.712	20 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.554.803.199	3.958.231.688	403.428.489	11 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.264.800	2.604.000	1.339.200	106 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.518.725.485	5.924.042.676	405.317.191	7 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	260.970.000	289.990.000	29.020.000	11 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	581.234.421	668.834.496	87.600.075	15 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	11.375.000	11.375.000	100 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	556.369.662	692.599.016	136.229.354	24 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0	0	0 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.170.000	2.170.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	57.000.000	53.000.000	(4.000.000)	7 %

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.111.269.067	1.274.896.647	163.627.580	15 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.249.667.000	3.306.108.000	56.441.000	2 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	240.154.950	240.154.950	0	0 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.389.047.832	1.563.781.832	174.734.000	13 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	43.380.000	43.380.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	420.000.000	420.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	122.947.500	165.439.870	42.492.370	35 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.630.025.138	10.130.362.575	500.337.437	5 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.577.089.875	3.107.654.365	530.564.490	21 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20.000.000	21.070.000	1.070.000	5 %
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	52.840.000	51.685.000	(1.155.000)	2 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.042.982.000	2.072.043.030	29.061.030	1 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	668.000.000	668.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.000.000	160.000.000	130.000.000	433 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.500.000	40.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	223.700.000	226.700.000	3.000.000	1 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	8.800.000	8.800.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	56.730.000	56.730.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000	35.000.000	25.000.000	250 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	267.850.000	248.150.000	(19.700.000)	7 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	25.232.000	61.752.000	36.520.000	145 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	183.375.000	193.375.000	10.000.000	5 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	38.000.000	22.000.000	(16.000.000)	42 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	107.637.009.991	125.168.084.181	17.531.074.190	16 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.704.616.902	116.244.165.857	16.539.548.955	17 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.923.686.895	5.780.949.900	857.263.005	17 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.783.840.000	6.067.790.000	283.950.000	5 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	183.600.000	145.200.000	(38.400.000)	21 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	108.000.000	108.000.000	0	0 %

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	919.600.000	918.800.000	(800.000)	0 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	99.798.900	71.598.900	(28.200.000)	28 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	52.150.000	50.400.000	(1.750.000)	3 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	445.200.000	445.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.760.000	1.685.760.000	1.680.000.000	29.167 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.134.002.477	33.566.003.653	7.432.001.176	28 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	565.800.000	565.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	306.000.000	306.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	220.400.000	220.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	198.950.000	198.950.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	380.450.000	381.450.000	1.000.000	0 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	26.000.000	26.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.483.560.000	9.330.030.000	(153.530.000)	2 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.184.200.000	2.259.350.000	75.150.000	3 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.910.771.723	4.939.595.000	28.823.277	1 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.884.881.500	4.177.279.300	292.397.800	8 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.328.870.000	2.324.755.000	(4.115.000)	0 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.171.510.000	1.276.710.000	105.200.000	9 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.150.300.000	1.189.111.461	38.811.461	3 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	32.700.000	32.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	159.900.000	148.700.000	(11.200.000)	7 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	18.000.000	18.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	34.600.000	60.428.000	25.828.000	75 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	212.654.250	325.584.250	112.930.000	53 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.324.000.000	1.964.250.000	(359.750.000)	15 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	131.000.000	172.000.000	41.000.000	31 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	110.033.000	99.969.100	(10.063.900)	9 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	136.771.000	191.105.000	54.334.000	40 %

5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.848.240.000	5.851.840.000	3.600.000	0 %
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	19.663.500	2.000.000	(17.663.500)	90 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	127.500.000	127.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	783.600.000	1.102.850.000	319.250.000	41 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	209.208.000	229.145.000	19.937.000	10 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	624.644.823	613.248.153	(11.396.670)	2 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.122.610.590	4.233.241.606	110.631.016	3 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	130.268.313	167.157.313	36.889.000	28 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.690.440.803	1.708.150.830	17.710.027	1 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	24.825.000	31.985.000	7.160.000	29 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	347.626.700	342.956.500	(4.670.200)	1 %
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	17.145.999.428	22.733.221.891	5.587.222.463	33 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.150.815.558	1.122.818.758	(27.996.800)	2 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0	17.688.000	17.688.000	100 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	259.200	259.200	0	0 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	676.679.958	555.183.958	(121.496.000)	18 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	446.726.400	533.433.600	86.707.200	19 %
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	27.150.000	16.254.000	(10.896.000)	40 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	892.238.000	933.564.440	41.326.440	5 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	174.000.000	108.998.000	(65.002.000)	37 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	333.600.000	376.700.000	43.100.000	13 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000	40.000.000	10.000.000	33 %
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	3.400.000	3.400.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.600.000	14.200.000	(5.400.000)	28 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	186.938.000	202.915.640	15.977.640	9 %
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	24.200.000	34.200.000	10.000.000	41 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	18.000.000	50.650.800	32.650.800	181 %
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	6.500.000	6.500.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	6.000.000	6.000.000	0	0 %

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.362.311.000	1.555.431.000	193.120.000	14 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	33.631.000	147.841.000	114.210.000	340 %
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.011.500.000	544.100.000	(467.400.000)	46 %
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	131.000.000	123.000.000	(8.000.000)	6 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	126.180.000	677.490.000	551.310.000	437 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.392.634.400	1.152.844.201	(239.790.199)	17 %
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	585.365.600	275.273.500	(310.092.100)	53 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	225.000.000	225.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	39.200.000	39.200.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	11.377.200	7.788.500	(3.588.700)	32 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	365.000.000	350.000.000	(15.000.000)	4 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.541.600	5.670.800	(2.870.800)	34 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	22.000.000	22.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	85.000.000	172.109.995	87.109.995	102 %
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	51.150.000	26.250.000	(24.900.000)	49 %
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	0	14.551.406	14.551.406	100 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.148.924.131	1.341.099.925	192.175.794	17 %
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	54.000.000	54.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0	300.775.794	300.775.794	100 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	808.924.131	796.324.131	(12.600.000)	2 %

5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	150.000.000	0	(150.000.000)	100 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	36.000.000	90.000.000	54.000.000	150 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	163.260.000	170.260.000	7.000.000	4 %
5.1.02.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	163.260.000	170.260.000	7.000.000	4 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.822.210.000	2.632.900.000	810.690.000	44 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	603.110.000	1.306.300.000	703.190.000	117 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	178.600.000	177.100.000	(1.500.000)	1 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.040.500.000	1.149.500.000	109.000.000	10 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.632.905.144	10.510.144.744	877.239.600	9 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	106.855.825	106.855.825	0	0 %
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	106.855.825	106.855.825	0	0 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.879.229.802	5.527.836.802	648.607.000	13 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.900.479.050	2.127.572.650	227.093.600	12 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	637.676.127	677.826.127	40.150.000	6 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.068.400.000	1.158.400.000	90.000.000	8 %
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0	21.400.000	21.400.000	100 %
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	43.200.000	43.200.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	243.400.000	267.400.000	24.000.000	10 %
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	18.000.000	18.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.000.000	28.000.000	5.000.000	22 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	430.840.000	484.490.000	53.650.000	12 %

5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.100.000	142.200.000	85.100.000	149 %
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	65.500.000	68.500.000	3.000.000	5 %
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	70.000.000	70.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	58.300.000	67.300.000	9.000.000	15 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	179.600.000	233.020.000	53.420.000	30 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	8.400.000	8.400.000	100 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	38.734.625	38.734.625	0	0 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000	20.393.400	393.400	2 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.165.209.517	1.681.942.117	516.732.600	44 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	933.429.517	1.400.162.117	466.732.600	50 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	53.000.000	53.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	80.000.000	130.000.000	50.000.000	63 %
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.780.000	8.780.000	0	0 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.481.610.000	3.193.510.000	(288.100.000)	8 %
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	450.000.000	600.000.000	150.000.000	33 %
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	1.998.760.000	1.998.760.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	971.850.000	498.750.000	(473.100.000)	49 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	61.000.000	76.000.000	15.000.000	25 %

5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.129.640.660	48.048.350.996	2.918.710.336	6 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.129.640.660	48.048.350.996	2.918.710.336	6 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.627.430.660	47.513.640.996	2.886.210.336	6 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	276.360.000	275.100.000	(1.260.000)	0 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	225.850.000	259.610.000	33.760.000	15 %
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0	0 %
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	0	0	0	0 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.731.670.000	6.265.708.000	534.038.000	9 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.072.550.000	2.088.500.000	15.950.000	1 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	53.950.000	62.200.000	8.250.000	15 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.600.000	27.300.000	14.700.000	117 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.706.000.000	1.699.000.000	(7.000.000)	0 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.659.120.000	4.177.208.000	518.088.000	14 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.025.450.000	2.235.830.000	210.380.000	10 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.633.670.000	1.941.378.000	307.708.000	19 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.193.658.250	33.924.644.400	9.730.986.150	40 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.193.658.250	33.924.644.400	9.730.986.150	40 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.193.658.250	33.924.644.400	9.730.986.150	40 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.641.241.895	108.134.889.517	17.493.647.622	19 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.641.241.895	108.134.889.517	17.493.647.622	19 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.641.241.895	108.134.889.517	17.493.647.622	19 %
5.1.05	Belanja Hibah	85.745.918.875	91.950.659.867	6.204.740.992	7 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	73.935.590.875	80.470.457.370	6.534.866.495	9 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.585.403.755	30.670.609.000	2.085.205.245	7 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.155.380.255	3.852.000.000	696.619.745	22 %

5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.430.023.500	26.818.609.000	1.388.585.500	5 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.240.637.120	24.809.573.120	2.568.936.000	12 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.283.000.000	5.823.000.000	540.000.000	10 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.035.037.120	10.980.893.120	1.945.856.000	22 %
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.922.600.000	8.005.680.000	83.080.000	1 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.009.550.000	24.890.275.250	1.880.725.250	8 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.638.550.000	2.688.550.000	50.000.000	2 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.881.000.000	22.201.725.250	2.320.725.250	12 %
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	490.000.000	0	(490.000.000)	100 %
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.966.260.000	10.636.134.497	(330.125.503)	3 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.966.260.000	10.636.134.497	(330.125.503)	3 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.966.260.000	10.636.134.497	(330.125.503)	3 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	844.068.000	844.068.000	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	844.068.000	844.068.000	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	844.068.000	844.068.000	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.551.679.047	46.701.242.043	13.149.562.996	39 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.305.728.767	25.655.841.763	11.350.112.996	79 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	12.203.428.767	23.651.541.763	11.448.112.996	94 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.203.428.767	23.651.541.763	11.448.112.996	94 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.102.300.000	2.004.300.000	(98.000.000)	5 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.102.300.000	2.004.300.000	(98.000.000)	5 %

5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	16.898.530.280	19.728.980.280	2.830.450.000	17 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.700.000.000	1.560.000.000	(1.140.000.000)	42 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.700.000.000	1.560.000.000	(1.140.000.000)	42 %
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	14.198.530.280	18.168.980.280	3.970.450.000	28 %
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	14.198.530.280	18.168.980.280	3.970.450.000	28 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.245.420.000	1.214.420.000	(31.000.000)	2 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.245.420.000	1.210.420.000	(35.000.000)	3 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.245.420.000	1.210.420.000	(35.000.000)	3 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.102.000.000	102.000.000	(1.000.000.000)	91 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.102.000.000	102.000.000	(1.000.000.000)	91 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.102.000.000	102.000.000	(1.000.000.000)	91 %
5.2	BELANJA MODAL	128.549.067.339	144.192.729.963	15.643.662.624	12 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.662.198.679	34.239.189.608	6.576.990.929	24 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	198.430.000	215.480.000	17.050.000	9 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	198.430.000	215.480.000	17.050.000	9 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	90.000.000	120.000.000	30.000.000	33 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	40.250.000	41.800.000	1.550.000	4 %
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	19.500.000	0	(19.500.000)	100 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	48.680.000	53.680.000	5.000.000	10 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.235.000.000	1.190.000.000	(45.000.000)	4 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.235.000.000	1.190.000.000	(45.000.000)	4 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	490.000.000	490.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45.000.000	0	(45.000.000)	100 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	38.052.000	38.052.000	0	0 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	38.052.000	38.052.000	0	0 %

5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	38.052.000	38.052.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.235.644.095	2.433.559.595	197.915.500	9 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.161.095	63.561.095	45.400.000	250 %
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.800.000	3.500.000	700.000	25 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.861.095	7.861.095	0	0 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000	52.200.000	44.700.000	596 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.098.285.000	1.300.337.600	202.052.600	18 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	541.350.000	556.350.000	15.000.000	3 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	413.840.000	589.442.600	175.602.600	42 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.095.000	154.545.000	11.450.000	8 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.119.198.000	1.069.660.900	(49.537.100)	4 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	227.313.000	188.233.000	(39.080.000)	17 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	87.000.000	112.000.000	25.000.000	29 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	528.550.000	464.362.000	(64.188.000)	12 %
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.500.000	4.500.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	271.835.000	300.565.900	28.730.900	11 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	121.300.000	269.675.000	148.375.000	122 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	121.300.000	269.675.000	148.375.000	122 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.300.000	69.300.000	65.000.000	1.512 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	93.000.000	159.375.000	66.375.000	71 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	24.000.000	41.000.000	17.000.000	71 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.023.761.000	20.061.867.566	5.038.106.566	34 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.470.000.000	2.641.730.566	1.171.730.566	80 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0	1.171.730.566	1.171.730.566	100 %
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.470.000.000	1.470.000.000	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.553.761.000	17.420.137.000	3.866.376.000	29 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	13.553.761.000	17.420.137.000	3.866.376.000	29 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	60.250.000	57.000.000	(3.250.000)	5 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	57.000.000	57.000.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang	7.000.000	7.000.000	0	0 %

5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.250.000	0	(3.250.000)	100 %
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	3.250.000	0	(3.250.000)	100 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.026.509.084	4.159.338.019	1.132.828.935	37 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.436.356.259	2.946.138.819	509.782.560	21 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.000.000	156.000.000	132.000.000	550 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.412.356.259	2.790.138.819	377.782.560	16 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	590.152.825	1.213.199.200	623.046.375	106 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	37.177.275	37.177.275	100 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.500.000	97.845.000	77.345.000	377 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	569.652.825	1.078.176.925	508.524.100	89 %
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	54.700.000	54.700.000	100 %
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	54.700.000	54.700.000	100 %
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0	54.700.000	54.700.000	100 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	42.600.000	42.600.000	0	0 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	42.600.000	42.600.000	0	0 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	42.600.000	42.600.000	0	0 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.880.652.500	3.316.917.428	(563.735.072)	15 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.880.652.500	3.316.917.428	(563.735.072)	15 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.880.652.500	3.316.917.428	(563.735.072)	15 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000	2.200.000.000	400.000.000	22 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000	2.200.000.000	400.000.000	22 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000	2.200.000.000	400.000.000	22 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.589.643.856	32.207.643.856	2.618.000.000	9 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.609.643.856	30.497.643.856	1.888.000.000	7 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.609.643.856	30.497.643.856	1.888.000.000	7 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	785.000.000	1.167.000.000	382.000.000	49 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.151.238.229	10.616.238.229	465.000.000	5 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.466.864.119	9.466.864.119	0	0 %

5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0	66.000.000	66.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.243.000.808	1.243.000.808	0	0 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.640.000.000	1.620.000.000	(20.000.000)	1 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	143.540.700	143.540.700	0	0 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	180.000.000	1.175.000.000	995.000.000	553 %
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	250.000.000	250.000.000	100 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	250.000.000	250.000.000	100 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0	250.000.000	250.000.000	100 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	900.000.000	1.380.000.000	480.000.000	53 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	900.000.000	1.380.000.000	480.000.000	53 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	900.000.000	1.380.000.000	480.000.000	53 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.804.620.404	67.969.083.824	5.164.463.420	8 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.819.725.045	57.932.520.465	4.112.795.420	8 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	51.019.725.045	54.462.423.045	3.442.698.000	7 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	35.950.725.045	36.687.872.045	737.147.000	2 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0	0	0	0 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.069.000.000	17.774.551.000	2.705.551.000	18 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.800.000.000	3.470.097.420	670.097.420	24 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.150.000.000	2.970.097.420	820.097.420	38 %
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	650.000.000	500.000.000	(150.000.000)	23 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.490.930.000	1.616.598.000	125.668.000	8 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	786.900.000	904.068.000	117.168.000	15 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	786.900.000	904.068.000	117.168.000	15 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	64.030.000	64.030.000	0	0 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	64.030.000	64.030.000	0	0 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	640.000.000	648.500.000	8.500.000	1 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	640.000.000	648.500.000	8.500.000	1 %

5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	928.515.359	1.446.515.359	518.000.000	56 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0	500.000.000	500.000.000	100 %
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0	500.000.000	500.000.000	100 %
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	925.515.359	943.515.359	18.000.000	2 %
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	925.515.359	943.515.359	18.000.000	2 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.215.450.000	6.503.450.000	288.000.000	5 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.215.450.000	6.465.450.000	250.000.000	4 %
5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	6.215.450.000	6.465.450.000	250.000.000	4 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	38.000.000	38.000.000	100 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	38.000.000	38.000.000	100 %
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000	470.000.000	120.000.000	34 %
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000	470.000.000	120.000.000	34 %
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000	470.000.000	120.000.000	34 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.492.604.400	9.776.812.675	1.284.208.275	15 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	98.045.000	762.189.000	664.144.000	677 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	78.045.000	747.189.000	669.144.000	857 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	78.045.000	747.189.000	669.144.000	857 %
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	25 %
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	25 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.394.559.400	9.014.623.675	620.064.275	7 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.394.559.400	9.014.623.675	620.064.275	7 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.394.559.400	9.014.623.675	620.064.275	7 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.313.022.000	2.513.022.000	200.000.000	9 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.313.022.000	2.513.022.000	200.000.000	9 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.313.022.000	2.513.022.000	200.000.000	9 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.313.022.000	2.513.022.000	200.000.000	9 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.313.022.000	2.513.022.000	200.000.000	9 %
5.4	BELANJA TRANSFER	535.118.590.199	551.060.977.199	15.942.387.000	3 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.749.727.099	5.139.257.099	389.530.000	8 %

5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.000.000.000	3.431.653.299	431.653.299	14 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.000.000.000	3.431.653.299	431.653.299	14 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.000.000.000	3.431.653.299	431.653.299	14 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.749.727.099	1.707.603.800	(42.123.299)	2 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.749.727.099	1.707.603.800	(42.123.299)	2 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.749.727.099	1.707.603.800	(42.123.299)	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	530.368.863.100	545.921.720.100	15.552.857.000	3 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	530.368.863.100	545.921.720.100	15.552.857.000	3 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	530.368.863.100	545.921.720.100	15.552.857.000	3 %
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	38.000.000	38.000.000	0	0 %
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	446.168.583.000	461.692.051.000	15.523.468.000	3 %
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	84.162.280.100	84.191.669.100	29.389.000	0 %
	Jumlah Belanja	1.861.167.804.930	1.954.981.043.614	93.813.238.684	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(6.186.554.010)	(81.614.482.843)	(75.427.928.833)	-1.219 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	6.186.554.010	81.614.482.843	75.427.928.833	1.219 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

AULIA SOFYAN, Ph.D.



PPID Bireuen

Administrator .